



Pusat Analisis Keperlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS NASIONAL UNTUK MENDORONG PENGGUNAAN MATA UANG LOKAL

Venti Eka Satya

Analisis Legislatif Ahli Madya
venti.satya@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah Indonesia telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nasional untuk mendorong peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi Indonesia dengan negara mitra (Local Currency Transaction/LCT). Bank Indonesia (BI) meyakini bahwa Satgas Nasional LCT akan menjadi wadah koordinasi yang semakin memperkuat sinergi kebijakan antarkementerian/lembaga dalam upaya meningkatkan penggunaan mata uang lokal pada transaksi bilateral Indonesia dengan negara mitra utama.

Pembentukan Satgas Nasional tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) antarlembaga tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan Mata Uang Lokal dalam Transaksi Indonesia dengan Negara Mitra yang disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada tanggal 5 September 2023. Satgas Nasional ini melibatkan sepuluh Kementerian/Lembaga (K/L) yang terdiri dari: BI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Pembentukan Satgas Nasional LCT ditujukan untuk mendorong implementasi kerangka kerja LCT sebagai bentuk dukungan terhadap upaya meningkatkan stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat resiliensi pasar keuangan domestik. Kerangka kerja sama LCT merupakan salah satu kesepakatan para pemimpin pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) di Labuan Bajo, pada bulan Mei 2023. Tujuannya untuk semakin memudahkan transaksi antarnegara dalam perdagangan, investasi, dan ritel. Implementasi LCT diharapkan dapat berkontribusi positif pada kegiatan ekspor-impor, investasi, transaksi pembayaran lintas batas, antara lain melalui *quick response cross border*, termasuk dalam memfasilitasi transaksi perdagangan surat-surat berharga.

Satgas Nasional LCT tersebut juga merupakan wujud nyata upaya otoritas nasional dalam rangka mendorong implementasi LCT yang selaras dengan salah satu program pemerintah dalam penguatan ekonomi nasional, melindungi rupiah terhadap volatilitas eksternal, dan memperdalam pasar keuangan. Melalui Satgas Nasional, antar-K/L akan merumuskan cara pemberian kemudahan, insentif, dan percepatan pelayanan ekspor-impor bagi pelaku usaha yang menggunakan mata uang lokal dalam transaksinya dengan negara mitra. Selain itu, pembentukan Satgas ini juga akan mempermudah koordinasi kebijakan dan penerapan ketentuan di area perbankan dan sektor keuangan, serta kebijakan yang mendukung perluasan penggunaan LCT dalam transaksi pembayaran antarnegara.

Saat ini telah terdapat implementasi kerja sama LCT antara Indonesia dengan sejumlah negara di kawasan, yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok. Sementara itu, Indonesia juga telah

melakukan kesepakatan bersama dengan Singapura dan Korea Selatan untuk membangun kerangka implementasi kerja sama LCT. Penggunaan mata uang lokal sebelumnya juga telah dijajaki BI dengan India dan Arab Saudi. Secara bertahap, Indonesia terus berkomitmen mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan dolar Amerika Serikat dalam transaksi internasional.

Atensi DPR

Pembentukan Satgas Nasional LCT ditujukan untuk mendorong implementasi kerangka kerja LCT dalam meningkatkan stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat resiliensi pasar keuangan domestik. Tujuan kerangka kerja LCT adalah untuk mempermudah transaksi antarnegara dalam perdagangan, investasi, dan ritel. Implementasi LCT diharapkan dapat berkontribusi positif pada kegiatan ekspor-impor, investasi, serta transaksi pembayaran lintas batas. Satgas Nasional LCT tersebut juga merupakan wujud nyata upaya otoritas nasional dalam mendorong implementasi LCT yang selaras dengan program pemerintah dalam memperkuat ekonomi nasional, melindungi rupiah terhadap volatilitas eksternal, dan memperdalam pasar keuangan.

DPR RI, khususnya Komisi XI perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Satgas Nasional ini dalam merumuskan kebijakan yang mampu memberikan kemudahan dalam transaksi antarnegara sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu Komisi XI DPR RI juga perlu melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut agar dapat memberikan dampak yang optimal terhadap stabilitas makro ekonomi, terutama dari sisi perdagangan dan investasi luar negeri.

Sumber

bi.go.id, 5 September 2023;
investor.id, 5 September 2023;
jabarprov.go.id, 7 September 2023;
republika.co.id, 5 September 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023